

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022

Suhesti Ningsih¹⁾, Mennik Putriana Syva²⁾, Rukmini³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

¹E-mail: hesti.hegi@gmail.com

²E-mail: menniksyva28@gmail.com

³E-mail: rukmini.stie.aas@gmail.com

Abstract

The study aims to determine The effect of local Taxes on the finansial performance of district/city regional goverment finansial in Central Jawa in 2019-2022, The effect of Regional Retribution on Regional Goverment Finansial Performance in 2019-2022, The effect of Capital Expenditure on Regional Goverment Finansial Performance in 2019-2022. This Research is a quantitative reserch. The subject of this research is the District/City Regional Goverments in Ceintral Jawa, totaling 35 regencies and cities. The data used comes from the Realization Report of the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance. Data collection techniques using the documentation method. The requirements analysis test uses the classical assumption test, namely the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis, F test, t test, and coefficient of determination test (R^2). The results of the study show that Regional taxes have a sigmificant positive effect on the Finansial Performance of District/City Goverments in Central Jawa in 2019-2022, Regional Levies have no significant efeect on the Finansial Performance of Regency/City Goverments in Central Jawa in 2019-2022, Capital Expenditure has a significant negative effect on the Finansial Performance of Regency/City Regional Goverments in Central Jawa in 2019-2022.

Keywords : *Capital Expenditures, Local Goverment Finansial Performance, Regional Levies, Regional Taxes*

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang berpotensi untuk maju dapat di pengaruhi oleh adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, daerah otonom dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004. Implementasi kebijakan otonomi di suatu daerah mendorong pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangan daerah dengan tujuan menyelesaikan proses pembangunan tanpa tergantung sepenuhnya

pada bantuan dana dari pemerintah pusat. Sumber daya yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan keuangan yang mumpuni. Penerimaan pendapatan asli daerah, yang dicatat dari pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki peranan penting dalam menentukan jumlah dana yang digunakan untuk belanja daerah, termasuk belanja modal. Menurut PMK Nomor 214/PMK.05/2013, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode

akuntansi (12 bulan) dan memiliki nilai kapitalisasi di atas batas minimum yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Astiti dan Mimba (2016) bahwa kontribusi belanja modal yang baik akan berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya dana yang dialokasikan oleh pemerintah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui sumber-sumber keuangan yang lebih optimal. Fenomena di Jawa Tengah berupa pengoptimalisasian kinerja keuangan di Jawa Tengah yang sedang dilakukan pemerintah daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dengan belanja modal dan berfokus pada intensifikasi pajak daerah atau retribusi daerah dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan dengan melalui pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Menurut Mardiasmo (2013) Pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha tanpa mendapatkan imbalan pribadi yang sebanding, yang dapat dikenakan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

Baihaqi (2016) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah penarikan biaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan usaha sebagai pembayaran atas layanan atau izin tertentu, yang melibatkan imbalan langsung yang berbeda dengan pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2022) bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang

menyatakan bahwa dengan meningkatnya retribusi daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2019-2022.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, maka menarik untuk dilakukan penelitian kembali terkait kinerja keuangan pada pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini mengambil judul : **“ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022.**

Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh perorangan atau badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mencapai kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin.

Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perpajakan Daerah, definisi retribusi daerah adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi sebagai ganti layanan atau pemberian izin tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu.

Belanja Modal

Menurut PMK Nomor 214/PMK.05/2013 yang menetapkan Bagan Akun Standar mencakup pengaturan terkait belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang

menghasilkan manfaat jangka panjang. Belanja modal ini dapat berupa pembelian aset daerah yang digunakan untuk meningkatkan layanan publik (misalnya meningkatkan infrastruktur daerah). Belanja modal juga dapat berupa belanja rutin sepertieliharaan (Andirfa, Basri dan Majid, 2016).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kapasitas daerah atau penilaian terhadap potensi pelaksanaan otonomi daerah dapat dilkakukan dengan menggunakan kinerja keuangan daerah atau kapasitas daerah sebagai salah satu indikator evaluasi (Halim, 2016). Menganalisis seberapa besar alokasi anggaran pemerintah yang benar-benar digunakan untuk mengukur kinerja keuangan.(Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin 2012).

Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa populasi mengacu pada seluruh wilayah yang terdiri dari objek atau entitas yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu yang menjadi fokus penelitian dan kesimpulan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah semua pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah, termasuk 6 kota dan 29 kabupaten, dalam jangka waktu 4 tahun 2019 hingga 2022.

Menurut Sugiyono (2017), istilah “sampel” merujuk pada bagian yang dipilih dari populasi

yang memiliki ukuran dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan teknik sampling jenuh. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa sampling jenuh adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel.dalam rentang waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022, digunakan metode non-probability sampling dengan total 140 sampel

2.2 Data Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

dalam penelitian ini. Digunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Metode penelitian kuantitatif melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data berbasis angka, serta penekanan pada analisis data angka sebagai hasilnya (Sugiyono, 2018).

b. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini memanfaatkan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017), teknik dokumentasi digunakan untuk merekam catatan peristiwa masa lalu. Dokumen yang dapat digunakan dalam teknik ini meliputi tulisan, gambar, atau karya monumental.

2.3 Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (X)

Variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Belanja Modal (X3).

2. Variabel Dependen (Y)

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4 Metode Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah statistik yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang dikumpulkan dengan menggambarkan atau mengilustrasikan data sampel yang telah terkumpul tanpa maksud untuk membentuk keputusan yang valid. (Sugiyono, 2018).

b. Uji Asumsi Klasik

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PD	140	35,96	1745,45	168,66	247,32
RD	140	5,32	113,68	22,28	15,72
BM	140	75,18	1054,76	315,34	156,26
KKPD	140	0,10	0,58	0,19	0,07
Valid N (listwise)	140				

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut valid dan terhindar dari terjadinya evaluasi yang salah. Penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokolerasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

c. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan software SPSS dalam analisis regresi linear berganda.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ferdinand (2014), uji F digunakan untuk mengevaluasi validitas model regresi yang telah dikembangkan. Keberadaan pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi akan menunjukkan kevalidan model tersebut.

3. Uji t

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk mengevaluasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai kritis yang tercantum dalam tabel distribusi t (Ghozali, 2018).

4. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sujarweni (2015), Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengestimasi persentase variasi dalam variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X), dan nilai ini ditampilkan dalam bentuk Adjusted R-Square.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

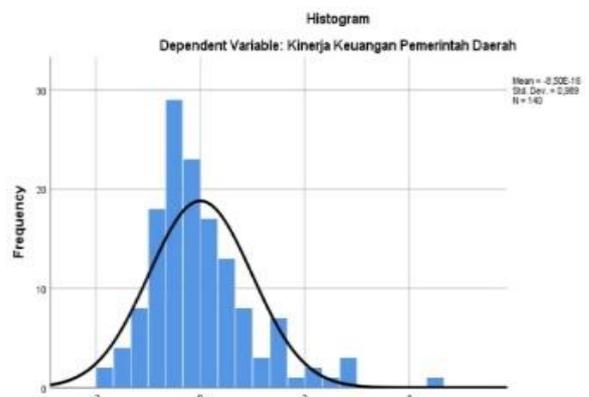
Tabel 1
Statistik Deskriptif

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dari penelitian ini sejumlah 140. Dari 140 sampel ini, Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai minimum 0,010 dan maksimum 0,58 sedangkan rata-rata sebesar 0,1950 dengan standar deviasi 0,07. Variabel Pajak Daerah (X1) memiliki nilai minimum 35,96 dan maksimum 1745,45 sedangkan rata-rata sebesar 168,66 dengan standar deviasi 247,32 Variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai minimum 5,32 dan maksimum 113,68 sedangkan rata-rata sebesar 22,28 dengan standar deviasi 15,72. Variabel Belanja Modal (X3) memiliki nilai minimum 75,18 dan maksimum 1054,76 sedangkan rata-rata sebesar 315,34 dengan standar deviasi 156,26.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas Histogram

Pola distribusi yang cenderung normal dapat diidentifikasi melalui grafik histogram, di mana data mengikuti pola garis yang terlihat dalam grafik tersebut.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

a. Dependent Variable : KKPD

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat Tolerance memiliki nilai tidak kurang dari 0,01 dan Faktor Inflasi Varians (VIF) untuk setiap variabel juga memiliki nilai kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 3
Uji Autokorelasi

Model	R	R Squared	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	0,796 ^a	0,634	0,626	0,0449	2,157

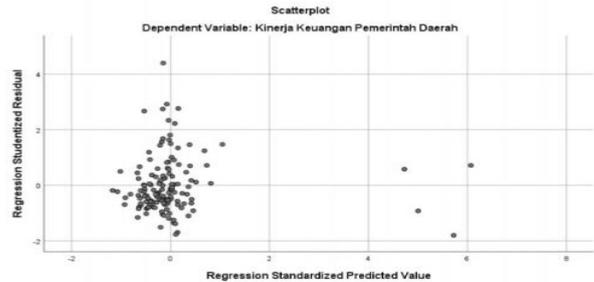
a. Predictors: (Constant), BM, RD, PD

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Berdasarkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,157, serta tabel DW dengan jumlah sampel 140 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), dapat disimpulkan bahwa nilai DW 2,157 berada di antara batas atas (dua) 1,7678 dan batas bawah (4-dua) 2,2322. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada adanya autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

data menyebar acak, tidak terlihat ada pola tertentu, serta grafik tersebut tidak menunjukkan pola yang jelas dan memiliki penyebaran yang seragam di kedua sisi angka 0 pada sumbu Y.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PD	0,222	4,509
RD	0,243	4,119
BM	0,544	1,837

Tabel 4
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	Koefisien Regresi	Std. Error
1 (Constant)	0,193	0,011
PD	0,000	0,000
RD	0,00006747	0,000
BM	0,000	0,000

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu : $Y = 0,193 + 0,000 PD + 0,00006747 RD + 0,000 BM + e$

Keterangan :

- a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan sebesar nilai konstanta, ketika Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Belanja Modal (X3) bernilai 0 atau konstan dengan nilai konstanta sebesar 0,193.

b. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 0,000 diartikan bahwa

Model	t	Sig.	Hasil Penelitian
1 (Constant)	18,073	0,000	
PD	8,731	0,000	Berpengaruh Signifikan
RD	0,137	0,891	Tidak Berpengaruh Signifikan
BM	-4,546	0,000	Berpengaruh Signifikan

apabila terdapat kenaikan 1 satuan pada variabel Pajak Daerah maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan naik sebesar 0,000 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

c. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 0,00006747 diartikan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 satuan pada variabel Retribusi Daerah maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan naik sebesar 0,00006747 dengan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 regression	0,476	3	0,159	78,667	0,000 ^b
Residual	0,274	136	0,002		
Total	0,751	139			

asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

d. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X3) sebesar 0,000 diartikan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 satuan pada variabel Belanja Modal maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan naik sebesar 0,000 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Tabel 5
Uji F

- a. Dependent Variable: KKPD
b. Predictors: (Constant), BM, RD, PD

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Penelitian dikatakan layak karena terdapat pengaruh variabel independen pada dependen memperoleh nilai signifikan 0,000. Sehingga menunjukkan nilai signifikan uji F hitung yaitu sebesar 78,667 dengan nilai signifikansi 0,000 yang di mana lebih kecil dari 0,05 dan F-hitung sebesar 78,667 > F-tabel sebesar 2,67 yang berarti model regresi dengan uji F layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6
Uji t

- a. Dependent Variable : KKPD
Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dengan t_{tabel} sebesar 1,6560 dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada variabel pajak daerah (X1) terdapat nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) artinya variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pada variabel retribusi daerah (X2) terdapat nilai signifikan sebesar 0,891 menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) artinya variabel retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Pada variabel belanja modal (X3) terdapat nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) artinya variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,796 ^a	0,634	0,626	0,04492

- a. Predictors: (Constant), BM, RD, PD
b. Dependent Variable : KKPD

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2023

Dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,626 dapat disimpulkan bahwa sekitar 62,6% variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal yang digunakan dalam analisis ini. Sisanya, sebesar 37,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.2.Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa nilai *t* hitung untuk pajak daerah adalah 8,731 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai *t* hitung 8,731 > *t* tabel sebesar 1,6560. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pajak Daerah memainkan peran penting sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat secara proporsional.

Hasil penelitian ini serupa dengan temuan yang dilakukan oleh Sari (2017), yang mengindikasikan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Sari (2017), juga disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pajak daerah,

semakin meningkat pula kinerja keuangan pemerintah.

Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan yang dilakukan oleh Salsabila (2022), yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan sebelumnya. Penelitian Salsabila (2022) menyatakan bahwa pajak daerah dapat memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti dapat menurunkan performa keuangan.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji *t* yang diperoleh dari penelitian ini bahwa *t* hitung sebesar 0,137 dengan signifikan sebesar 0,891. Nilai signifikan untuk Retribusi Daerah menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai *t* hitung 0,137 < *t* tabel sebesar 1,6560. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak. Meskipun hasil penelitian tidak menunjukkan pengaruh positif signifikan, hal ini tidak berarti bahwa retribusi daerah dapat diabaikan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun retribusi daerah mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap alokasi pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga belum memberikan dampak yang optimal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dalam penelitian Sari (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peningkatan retribusi daerah dapat mengurangi jumlah dana yang dialokasikan untuk pengelolaan urusan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila

(2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan peningkatan retribusi daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Nilai signifikan untuk Belanja Modal menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t hitung $-4,546 < t$ tabel sebesar 1,6560 dengan signifikan 0,000. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diterima.

Pelaksanaan Belanja Modal oleh pemerintah daerah telah memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan belanja modal dan pengalokasian yang optimal dengan kinerja keuangan pemerintah dapat meningkat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) Yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Akan tetapi, hasil yang berbeda terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2022) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut, peningkatan belanja modal dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

3. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyelesaian penelitian ini. Kami berharap agar kita semua mendapatkan keberhasilan dan keberkahan dalam perjalanan ini.

6. REFERENSI

- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1924-1950.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Doctoral dissertation, Udayana University)*.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Ferdinand, A. 2014. *Metode penelitian manajemen: pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen (5th ed)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

214/PMK.05/2013.

- Halim, Abdul dan M. S. Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1): 15-29.
- Kristiyanti LMS, et al. 2022. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23 (01).
- PMK Nomor 2014/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. *Kementerian Keuangan*.
- Sari, R. N. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017*
- Salsabilla, A. K. 2022. *Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta : Surakarta).
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Indonesia: Afabeta Bandung
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Indonesia: Afabeta Bandung
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit Pustaka Baru Press